



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 022/04022009
HARI : RABU
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2009

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
1.	Indonesia Akan Sumbang Satu Rumah Sakit di Gaza	3
2.	Jaksa ICC Lakukan Analisis Awal atas Situasi Gaza	3
3.	Pengamat: Korea Utara Cari Perhatian Amerika Serikat	4
4.	Kunjungan Luar Negeri Pertama Menlu Clinton Berencana ke Asia	4
5.	Pengungsi Rohingya Tak Mau Pulang	5
6.	RI rescues another 198 boatpeople in Aceh	6
7.	Yemeni-Indonesian joint committee commences meetings	6
8.	RI-SINGAPURA: Lima Tahun Pulau Nipah Merana	7
9.	RI to tighten security on new border with Singapore	7
II.	NASIONAL	
A.	POLITIK	
1.	Councilor dies after attack	8
B.	EKONOMI	
1.	DAYA SAING: Produk Indonesia Tak Kalah di AS	9
2.	Pembeli AS Langsung Beli ke Petani, Eksportir Kopi Merasa Dilangkahi	9
3.	Dubes Diminta Ikut Jaga Ekspor	10
4.	KRISIS EKONOMI Asia Pulih, Jika Tingkatkan Permintaan	11
5.	Pengangguran Bisa Naik 9%	11
C.	SOSBUD	
1.	100,000 Indonesian workers to be sent home	12
2.	Musik Dangdut Dipelajari di 70 Negara	13
3.	Tur "Laskar Pelangi" di Enam Kota Australia	13

	D.	HANKAM	
	1.	KRI Diponegoro Siap Bertolak ke Libanon	14
	E.	HUKUM	
	1.	KPK Kerja Sama dengan SPRM	14
	F.	OLAHRAGA	--
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	--
III.		ARTIKEL	
	1.	Creeping maritime jurisdiction: Disclosing what lies beneath the oceans (by I Made Andi Arsana)	15
IV.		LAIN-LAIN	--
V.		EDITORIAL	
	1.	Menemukan Kembali Irak	16

Jakarta, 4 Pebruari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. **Indonesia Akan Sumbang Satu Rumah Sakit di Gaza**

Pemerintah dan rakyat Indonesia siap menyumbang satu rumah sakit baru di Kota Gaza Palestina. Untuk mewujudkan itu, dana pemerintah akan digabungkan dengan dana masyarakat yang telah diamanahkan kepada organisasi relawan medis dan kemanusiaan.

Penjelasan itu diungkapkan Kepala Pusat Pengendalian Krisis Departemen Kesehatan (PPK Depkes) dr Rustam S Pakaya, MPH dan anggota Presidium "Medical Emergency Rescue Commite" (MER-C) Indonesia dr Joserizal Jurnalis, SpOT kepada ANTARA di Jakarta, Rabu pagi.

Keduanya memberikan informasi tersebut, setelah melaporkan hasil keseluruhan tugas tim aju kemanusiaan Republik Indonesia (RI), yang di dalamnya tergabung unsur pemerintah, LSM, dan Ormas, dan telah mengemban misi memberikan bantuan kepada rakyat Palestina di Jalur Gaza, kepada Menkes Siti Fadilah Supari.

"Pemerintah RI beserta rakyat Indonesia akan menyumbang satu `Rumah Sakit Indonesia` di Gaza. Tahap pertama (dana bantuan untuk RS itu) Rp20 miliar, rinciannya dari pemerintah RI 10 miliar, sedangkan dari masyarakat Indonesia yang dikumpulkan melalui MER-C Indonesia Rp10 miliar," kata Rustam S Pakaya.

Kemudian, kata dia, juga menyusul dana dari Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), Muhammadiyah dan sebagainya. "Untuk gambar disain rumah sakit sudah bagus," katanya.

Sedangkan Joserizal Jurnalis menambahkan bahwa Menkes telah setuju mengalokasikan dana bantuan dari pemerintah untuk pembangunan "Rumah Sakit Indonesia" di Gaza itu sebanyak Rp10 miliar.

"Beliau menyambut baik sekali pendirian rumah sakit di Gaza, dan berharap kalau bisa segera diwujudkan," katanya.

Menurut dia, dengan adanya rumah sakit tersebut, emungkinan diberi nama "Rumah Sakit Indonesia" itu, maka babak baru hubungan persahabatan antara pemerintah dan rakyat Indonesia dengan Palestina -- setelah hubungan diplomatik dengan dibukanya Kedubes Palestina di Jakarta -- dapat dibangun melalui bidang kesehatan, yang kemudian bisa berkembang pada hubungan lainnya.

Wacana perlunya dibangun satu rumah sakit baru di Gaza, dimunculkan MER-C Indonesia setelah selama sepekan berada di wilayah yang terus dilanda konflik itu mendapati banyak rumah sakit yang hancur dan rusak akibat dihantam peluru kendali pesawat tempur Israel.

Agresi Israel atas Jalur Gaza juga mengakibatkan sekira 1.300 warga Palestina dan 13 orang Israel tewas akibat perang di Gaza itu -- dan ribuan warga Gaza lainnya luka-luka--sebelum kedua pihak menyatakan mengakhiri pertempuran pada 18 Januari.

Israel meninggalkan Jalur Gaza setelah daerah pesisir itu hancur akibat serangan 22 hari (sejak 27 Desember 2008). Mereka menyelesaikan penarikan pasukan dari wilayah yang dikuasai Hamas itu pada Rabu (21/1).

Setelah melihat kondisi yang ada, kata Joserizal, ia mendiskusikannya dengan staf teknik dan logistik MER-C Ir Faried Thalib, yang kemudian mengerucut pada lahirnya wacana perlunya dibangun satu rumah sakit dimaksud.

Faried Thalib sendiri mengatakan bahwa wacana itu, saat disampaikan kepada Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Mesir Abdurrahman Mohammad (AM) Fachir juga mendapat sambutan yang baik.

"Itu ide yang sangat baik," katanya mengutip pernyataan Dubes. (ANTARA)

2. **Jaksa ICC Lakukan Analisis Awal atas Situasi Gaza**

Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memulai "analisis awal" terhadap dugaan tindak kriminal yang dilakukan Israel saat menggelar serangan di Jalur Gaza.

Jaksa Luis Moreno-Ocampo telah menerima komunikasi terhadap masalah itu dari Menteri Kehakiman Palestina Ali Khashan, Otoritas Nasional Palestina, dan lebih dari 200 orang serta lembaga nonpemerintah. "Kantor jaksa akan meneliti semua isu yang relevan, termasuk mengenai yurisdiksi, dengan sangat hati-hati.

Analisis awal yang dilakukan kantor jaksa bukan indikasi bahwa investigasi akan dilakukan,"ungkap pernyataan kantor jaksa dalam e-mail kepada AFP. Kantor Moreno-Ocampo mengatakan dia telah bertemu Kashan di Den Haag, Belanda, pada 22 Januari lalu, ketika mereka membahas dugaan adanya tindak kejahatan yang dilakukan di Gaza.

Pada hari yang sama, Otoritas Nasional Palestina (PNA) melayangkan deklarasi dengan pendaftar ICC, yang mengakui yurisdiksi pengadilan terhadap dugaan tindakan kriminal, alasannya tidak diungkapkan kantor jaksa. Kantor itu juga tidak mengatakan apakah ada individu Israel yang telah dijadikan target penyidikan.

Kantor Moreno-Ocampo menegaskan bahwa ICC, yang mulai bekerja pada 2002 sebagai pengadilan permanen pertama yang menyidangkan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di dunia, tidak punya kompetensi atas situasi di Gaza.

Pengadilan ini bisa mengadili seorang individu jika dugaan tindakan kriminal dilakukan di sebuah wilayah atau bangsa yang menandatangani perjanjian Undang-Undang Roma, yang mendasari didirikannya ICC, atau diminta salah satu negara—yang tidak dilakukan Israel.

Jaksa juga dapat memulai penyidikan terhadap situasi Gaza atas permintaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atau jika salah satu negara menerima yurisdiksi pengadilan—cara yang sedang ditempuh PNA. Palestina tidak diakui sebagai negara independen.

Kantor Moreno-Ocampo mengatakan, sejak awal Januari, pihaknya telah menerima sekitar 210 "komunikasi" dari berbagai pihak yang mengusahakan investigasi terhadap konflik Israel-Palestina. Undang-Undang Roma juga memberikan wewenang bagi jaksa ICC, kalau dia yakin ada dasar logis untuk memulai investigasi, untuk meminta pengadilan mengesahkan penyidikan tersebut.

Analisis awal terhadap situasi di Republik Afrika Tengah memakan waktu tiga tahun sebelum kantor jaksa membuka investigasi resmi. Di kasus lain seperti Venezuela, dugaan tidak terbukti. (Koran Sindo)

3. Pengamat: Korea Utara Cari Perhatian Amerika Serikat

PENGAMAT politik internasional, dari Universitas Andalas (Unand), Virtuous Setyaka menilai, hubungan Korsel dan Korut yang mulai memanas, lebih akibat kepentingan nasional Korut mencari perhatian Amerika Serikat (AS) agar negara adi kuasa itu mengalirkan dana pembangunan.

"Kini untuk meraih bantuan itu, Korut dengan telah sengaja mengganggu sekutu-sekutu AS di seluruh dunia termasuk Korsel," kata Virtuous Setyaka di Padang, Selasa (3/2).

Ia mengatakan itu terkait hubungan Korsel dan Korut mulai memanas, dan penyebab utamanya adalah untuk memenuhi kepentingan nasional Korut sendiri.

Menurut dia, Korut menggunakan dua ancaman antara lain, meluncurkan misil taepodong-taepodong miliknya yang bisa mencapai AS.

"Dalam aksi itu, Korut sangat mengandalkan nuklirnya yang menakutkan dunia itu," kata Virtuous, staf pengajar program studi ilmu hubungan internasional, FISIP, Unand itu.

Sebaliknya, tambahnya, Indonesia tidak bisa berbuat banyak kecuali mendorong perdamaian dunia.

Jika tidak hati-hati, katanya lagi, Indonesia bisa terjebak perang ideologi, isu terorisme dan isu nuklir. "Dalam isu strategis tidak mungkin Indonesia memakai kekuatan karena akan bertentangan dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, apalagi Indonesia juga kalah dengan persenjataan," katanya. (Jurnal Nasional)

4. Kunjungan Luar Negeri Pertama Menlu Clinton Berencana ke Asia

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Hillary Rodham Clinton berencana mengunjungi negara-negara Asia dalam lawatan pertamanya ke luar negeri. Clinton diperkirakan akan mengunjungi Jepang, Korea Selatan dan China. Dalam lawatan yang akan dimulai pekan depan itu diperkirakan Clinton juga akan "mampir" ke salah satu negara di Asia Tenggara. Demikian ungkap salah seorang diplomat yang tidak mau disebut namanya karena agenda kunjungan masih berubah-ubah, Senin (2/2).

Dalam jawaban tertulisnya kepada Senat bulan lalu, Clinton mengatakan dia tengah menunggu kesempatan berkunjung ke Asia Tenggara. Secara khusus dia menyebut Indonesia

sebagai negara tujuan dengan titik berat membangkitkan kembali program "Peace Corps" yang dihentikan pada 1965.

Kunjungan Clinton ke Asia tersebut akan menekankan komitmen pemerintahan Presiden Barack Obama untuk menyelesaikan isu nuklir Korea Utara, menguatkan tujuannya untuk mempertahankan hubungan yang kuat dengan Tokyo dan Seoul serta meningkatkan hubungan dengan Beijing seperti yang dijanjikannya, kata diplomat itu. Saat menelepon Presiden China Hu Jintao Jumat (30/1) pekan lalu, Presiden Obama mengatakan dirinya menantikan kontak dini dan saling kunjungan pejabat senior kedua negara. Departemen Luar Negeri AS belum berkomentar mengenai rencana perjalanan Clinton tersebut. Wakil Atase Pers bidang Media Cetak Kedutaan Besar AS di Jakarta, Stafford AWARD saat dihubungi SH melalui pesan singkatnya, Selasa (3/2), mengaku tidak memiliki informasi apa pun soal kunjungan semacam itu.

Sementara Teuku Faizasyah, Juru Bicara Departemen Luar Negeri RI mengaku belum mendengar secara resmi rencana tersebut. "Apabila Menlu Clinton dalam kunjungan pertamanya ke wilayah Asia, mengunjungi Indonesia, maka hal ini mencerminkan tingkat hubungan, baik di antara kedua negara dan komitmen untuk terus membangun hubungan yang lebih baik dan strategis," katanya saat dihubungi SH, Selasa.

Lazimnya, Asia bukan wilayah yang menjadi tujuan lawatan luar negeri pertama pemerintahan baru AS. Biasanya kunjungan pertama adalah negara-negara Eropa atau Tengah. Dengan kunjungan Wakil Presiden Joe Biden ke Eropa pekan ini dalam rangka konferensi keamanan di Jerman, serta utusan khusus George Mitchell ke Timur Tengah, tampaknya Clinton bebas dari tradisi turun-temurun tersebut.

Kunjungan ke Indonesia, negara muslim terpadat di dunia, di mana Presiden Obama menghabiskan masa kecilnya akan menjangkau dua tujuan. Merangkul dunia muslim dan meyakinkan negara-negara Asia Tenggara akan perhatian AS di kawasan ini. Banyak negara Asia Tenggara merasa diabaikan oleh pemerintahan mantan Presiden George W Bush. (Sinar Harapan)

5. Pengungsi Rohingya Tak Mau Pulang

Para pengungsi Rohingya yang berhasil diselamatkan Angkatan Laut Indonesia mengaku ingin tetap tinggal di Indonesia.

Mereka enggan kembali ke Myanmar karena akan dipenjara junta militer. Menurut salah satu pengungsi, Rahmat, 43, dia meninggalkan negerinya karena takut dihukum junta militer. Sebenarnya, dia ingin mencari kerja di Thailand. "Saya tidak ingin kembali lagi ke Myanmar.

Kami akan dihukum 10 sampai 20 tahun. Saya ingin bekerja di sini dan tinggal di sini. Indonesia tidak dapat memaksa saya untuk kembali," tandasnya. Junta militer yang berkuasa menolak mengakui kewarganegaraan Rohingya dan memberlakukan diskriminasi hingga menyebabkan tragedi kemanusiaan.

Rahmat juga mengungkapkan penyiksaan militer Thailand. Pengungsi ditangkap militer Thailand dan dikumpulkan dengan jumlah mencapai 1.000 orang. Kemudian, mereka dibawa ke sebuah pulau dan disuruh tinggal selama dua bulan sebelum dipaksa berlayar ke tengah lautan dengan kapal tanpa mesin.

"Selama perjalanan, 20 orang di antara kami tewas karena tidak ada makanan dan air. Kami hanya berdoa sebelum membuang jenazah teman kami ke laut. Setiap hari, hampir saja ada pengungsi yang tewas," papar Rahmat. Penyiksaan terhadap pengungsi Myanmar itu dibenarkan Sutardi, salah satu pengungsi yang berhasil selamat.

Militer Thailand telah memaksa mereka berlayar ke lautan dengan menggunakan perahu tanpa mesin. Selain itu, militer Thailand menyiksa mereka. "Saya mengungsi karena dipaksa mengungsi junta militer," katanya. Badan PBB untuk urusan Pengungsi, UNHCR, mendesak Pemerintah Thailand melakukan penyelidikan atas insiden penyiksaan tersebut.

Pemerintah Thailand menyatakan suku Rohingya adalah pengungsi ekonomi sehingga harus dideportasi, dan menunggu laporan resmi dari pihak militer sebelum melaksanakan penyelidikan. Memang beberapa organisasi hak asasi manusia mengatakan orang Rohingya mendapat perlakuan buruk dari rejim militer Myanmar.

Dalam sebuah pernyataan pekan lalu, rejim militer Myanmar mengatakan bahwa mereka tidak mengakui Rohingya sebagai satu dari ratusan suku resmi di negara itu Sekitar 2 juta warga

Rohingya tinggal di kawasan pedalaman Myanmar dalam kondisi yang buruk. Sementara sekitar 25.000 dilaporkan mengungsi ke negara-negara tetangga, seperti Bangladesh dan Malaysia maupun Arab Saudi. (Koran Sindo)

6. RI rescues another 198 boatpeople in Aceh

The Foreign Ministry will send a team to investigate the arrival of another 198 boatpeople in Aceh province on Tuesday, an official said, the latest in a series of refugees to a number of Southeast Asian countries.

Ministry spokesman Teuku Faizasyah said Tuesday there was no clear information yet where the refugees came from, amid media reports that said they were Rohingya refugees from Myanmar.

Reuters reported Tuesday that Indonesian authorities found the 198 boatpeople floating in a wooden boat off the coast of Aceh after 21 days at sea, with some of them in critical condition.

The all-male group, which had gone without food for a week and which included a 13-year-old, was spotted by local fishermen, vice head of East Aceh district Nasrudin Abubakar said as quoted by Reuters.

AP reported that they had drifted for three weeks after authorities in Thailand forced them out to sea in a boat without an engine.

"The Foreign Ministry team will arrive tomorrow in Idi Rayeuk [regency] and will hold interviews with them to clarify their status," Faizasyah said. "The procedure will be similar to the ones we had with the other 193 refugees in Sabang [also in Aceh]."

The government has decided to deport the 193 Rohingya and Bangaladeshi refugees who arrived in Aceh on Jan. 7 after being rescued by local fishermen. They are being sheltered at a naval base in Sabang on Weh Island, and the Foreign Ministry team has met with them twice for interviews.

The decision to deport them was based on the results from the first interview, which found they were economic rather than political refugees.

When asked whether the deportation had been finalized amid concerns for their safety, Faizasyah said, "It has become our policy option. Our team, together with the IOM [International Organization for Migration], will complete their verification tomorrow, and we expect it to result in a recommendation by the end of this week."

He added the deportation procedure would be discussed with the IOM, which had been invited by the Foreign Ministry to help deal with the case.

The Rohingya people were found without any identity documents and the Myanmar government has denied they are its citizens.

Many Rohingya, mostly Muslims living on the border between Bangladesh and Myanmar, have fled to Thailand and Malaysia to escape persecution by Myanmar's regime. (The Jakarta Post)

7. Yemeni-Indonesian joint committee commences meetings

Yemeni- Indonesian Joint Committee started its second round's meetings here on Tuesday.

The meetings of the round are co-chaired by Deputy Minister of Planning and International Cooperation Hisham Sharaf and Indonesian Ambassador in Yemen Nour al-Aulia`a.

In the meeting, Sharaf highlighted historical relations between Yemen and Indonesia, indicating wide horizons for improving them in the framework of realizing joint interests. He took into consideration economic and trade privileges.

He noted importance of President Ali Abdullah Saleh`s visit to Indonesia because it has formed improved step for activating relations between the two countries and enhancing suitable mechanisms for utilizing existing possibilities in the two countries.

For his part, the Indonesian ambassador affirmed his country`s keenness on improving relations with Yemen, taking into consideration that Indonesia there is a number of Yemeni migrants who had com to the country in the thirteen century for spreading Islam.

The second round discusses during two-day meetings evaluation of cooperation between the two parts in fields of economy, trade, higher education, investment and sports and youth.

A number treaties and protocols are expected to be signed during the round.(ANTARA)

8. RI-SINGAPURA: Lima Tahun Pulau Nipah Merana

Lima tahun lamanya Pulau Nipah di Kepulauan Riau, yang berbatasan secara teritorial dengan Singapura, dibiarkan merana. Kecuali rencana penandatanganan kesepakatan batas teritorial laut Februari ini, tidak ada kemajuan perencanaan pembangunan di kawasan itu.

"Pulau Nipah selama ini tampaknya merana karena tergerus ombak. Kalau sedang surut, luas wilayahnya 60 hektar, tetapi bila pasang, luasnya hanya 0,62 hektar. Padahal, ini adalah salah satu pulau terluar yang sangat strategis dan penting bagi negeri kita," ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/2).

Di Kantor Presiden, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa, kembali menggelar rapat kabinet terbatas tentang pengembangan lebih lanjut di Pulau Nipah. Menteri terkait dilibatkan, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamil.

Rapat dilakukan untuk mengantisipasi penandatanganan kesepakatan batas teritorial laut Indonesia-Singapura. Pemerintah tengah membuat perencanaan tentang Pulau Nipah. "Pengembangan Pulau Nipah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, termasuk reklamasi pulau. Di situ akan ada pos TNI Angkatan Laut yang sudah disiapkan. Akan disiapkan juga tempat sebagai zona ekonomi," ujar Andi.

Terhadap rencana itu, Presiden sudah meminta menteri terkait melihat pengembangannya secara menyeluruh di kawasan Bintan, Karimun, dan Batam. Indonesia ingin mengambil manfaat sebesar-besarnya terhadap segitiga kawasan yang melibatkan Singapura, Malaysia, dan Indonesia, sambil memperkuat titik terluar yang perlu dijaga secara geopolitik.

Perencanaan pembangunan serupa tanpa realisasi hingga kini untuk Pulau Nipah juga dikemukakan tepat lima tahun lalu saat Presiden Megawati Soekarnoputri menerakan tapak kakinya pada monumen dan menanam pohon cemara laut di Pulau Nipah Februari 2004, setelah kembali dari Teheran, Iran.

Lima tahun lalu itu dibuat rencana reklamasi Pulau Nipah secara rinci menggunakan pasir laut. Ada tiga alternatif luas reklamasi Pulau Nipah, yaitu 30 hektar, 45 hektar, dan 65 hektar.(ANTARA)

9. RI to tighten security on new border with Singapore

Indonesia announced Tuesday it plans to build a military post on Nipah Island, part of Indonesia's most outer territory, after recently announcing the island would expand its border region with neighboring Singapore.

President Susilo Bambang Yu-dhoyono has instructed his Cabinet ministers to prepare the "blue print" for defensive and economic developments on the island, the northern part of which borders Singapore's Sultan Shoal Island.

The western area between the two islands was added to the Indonesia-Singapore border recently, expanding the central boundary established in 1973.

Foreign Minister Hassan Wira-yuda will meet with his Singaporean counterpart later this month to sign the agreement over the new border area, with negotiations over the final eastern section expected to quickly follow. Presidential spokesman

Andi Mallarangeng told reporters after a Cabinet meeting at the Presidential Palace that the president had ordered his ministers to draw up a comprehensive plan on the development of Nipah Island, which is "strategic" to Indonesia both economically and geopolitically.

"There will be a Navy post on the island, and we are currently preparing the development of infrastructure and economic expansion in the area," Andi said.

He added that for the purpose of ongoing development, the Indonesian government had been reclaiming the shoreline of the island in recent years.

Like with the economic development of the Riau Islands', Nipah will be integrated into the development of the inter-provincial Batam, Bintan and Karimun free trade zones as well as the development of the Sijori (Singapore, Malaysia's Johor and Indonesia's Riau Islands) Growth Triangle. The latter partnership was agreed upon by the three countries in the hope the subregion would become more attractive to regional and international investors.

"We want to anticipate future growth and get the most from the Sijori Growth Triangle while strengthening the most outer points of our nation," Andi said.

Defense Minister Juwono Sudarsono said the "blue print" for the multi-sector development of Nipah Island was being prepared by Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Widodo AS and Coordinating Minister for the Economy Sri Mulyani Indrawati.

He said the plan would outline the duties and financing required by each ministry. "The preparations will probably focus on the shipping and tourism industries, or the traffic systems monitoring merchant vessels," Juwono said. He added that with the expansion of trade in the area, they also anticipated a major increase in boats and trade vessels traveling through the area. (The Jakarta Post)

II. NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Councilor dies after attack

North Sumatra Provincial Legislative Council Speaker Abdul Aziz Angkat died of a heart attack at Gleni International Hospital on Tuesday, hours after he was set upon by a mob outside of the council building in Medan.

Chairman of the United Development Party's (PPP) North Sumatra chapter Fadly Nurzal said Aziz had died at about 12:45 p.m.

"I have just received official confirmation that Pak Aziz died of a heart attack. We must accept this as fate," he said.

Fadly said he regretted the anarchic action taken by a group of protesters, which he added may have triggered the heart attack. "We should take a lesson from this not to force our will [on others]. Establishing a new region is good but it should not be achieved through bad means."

Aziz was attacked by protesters rallying against the council's decision to postpone a plenary meeting to discuss a recommendation for a new province, called Tapanuli, to be created that had been scheduled for Wednesday.

"We postponed the plenary meeting to discuss the recommendation because there had not been a quorum during a leadership meeting to set our agenda," another PPP councilor, Apriadi, told the Post.

The crowd of about 2,000 protesters forced their way into the council building moments after the council had concluded the first out of three plenary meetings scheduled for the day and crowded around Aziz, hitting and kicking him and causing him to collapse.

The police were unable to quickly evacuate Aziz and his colleagues from the building because the Tapanuli province supporters had sealed the council compound and barricaded the entrance gates using trucks. The police engaged the protesters, eventually forcing them away from the compound.

Medan City Police chief, Sr. Comr. Aton Suhartono, denied allegations that there were not enough officers assigned to safeguard the council building.

"The plenary meeting hall was tightly guarded but the crowd suddenly broke through and entered the hall," he said.

Dean of the Social and Political Sciences Faculty at the North Sumatra University M. Arif Nasution said the demands for the creation of new provinces in North Sumatra had been masked by religious and ethnic tension. The proposed Tapanuli province is mapped to the current domain of the predominately Christian Batak Toba ethnic group. The proposed Southeast Sumatra province would border with the areas dominated by the Batak Angkola-Mandailing ethnic group, which is predominately Muslim.

"But the issue is much more relevant in Tapanuli province which is actually only championed by a number of people," Arif said.

He said the proposal to create Tapanuli province had been politicized and that it was at heart a religious and ethnic conflict. He added the proposal was a maneuver to attract supporters ahead of the April 9 legislative elections.

North Sumatra Governor Syamsul Arifin said he would take stern action against the protesters, including the rally coordinator.

"We expect all North Sumatra residents not to be incited by religious and ethnic issues related to this incident," he said. "The incident is not related to any race, religion or ethnicity."

North Sumatra Provincial Police chief Insp. Gen. Nanan Soekarna said seven people had been named suspects in the rally. "According to medical reports [from the hospital], the victim died of a heart attack. He had previously undergone cardiac bypass surgery."(The Jakarta Post)

B. EKONOMI :

1. DAYA SAING: Produk Indonesia Tak Kalah di AS

Meski ekspor ke Amerika Serikat menurun, daya saing barang produksi asal Indonesia di Amerika Serikat tidak kalah dengan barang sejenis dari negara lain. Khusus untuk sepatu, tekstil, dan pakaian jadi, produk dari Indonesia tetap diminati dan mempunyai keunggulan.

Hal itu dikatakan Wakil Presiden M Jusuf Kalla saat ditanya wartawan sebelum meninggalkan Tokyo, Jepang, menuju Amerika Serikat, se usai menerima penghargaan doktor honoris causa di Universitas Soka, Jepang, Senin (2/2).

"Ada produk tertentu di mana daya saing produk di AS, kita lebih baik. Sebut saja produk sepatu, tekstil, dan pakaian jadi, atau produk komoditas lain yang tidak diproduksi AS. Karena itu, meskipun ada penurunan ekspor, produk kita tetap lebih baik dan punya daya saing," ujar Kalla.

Menurut Kalla, sebagai negara liberal, AS tentu mengutamakan daya saing barang produksi negara lain yang masuk ke negaranya untuk keunggulan dan kualitas. "Hanya memang, sekarang ini, dengan krisis keuangan yang terjadi, AS harus lebih efisien lagi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di negaranya. Sebab, efisiensi di AS dapat berimbas positif terhadap negara lain di dunia," kata Kalla.

Ditanya tentang stimulus ekonomi dari Pemerintah AS yang kini belum direalisasikan, Wapres mengatakan, "Sebenarnya stimulus ekonomi itu lebih banyak bersifat dana talangan (bail-out). Sejauh mana cepat dilaksanakan agar perusahaan keuangan AS yang runtuh dapat pulih kembali. Biaya pemulihannya memang besar dan harus segera dilaksanakan. Harapan kita itu cepat direalisasi dan hanya soal waktu saja."

Soal rencana Pemerintah Jepang yang akan memberikan stimulus ekonomi senilai 17 triliun dollar AS untuk negara di Asia, Wapres menyatakan, hal itu harapan negara Asia yang terkena imbas krisis keuangan global.

Sebelum tiba di Washington DC, AS, untuk melakukan kunjungan kerja selama tiga hari dua malam, Wapres dan rombongan terbatas, yang menggunakan pesawat khusus BBJ Boeing 737-800 dan mengisi bahan bakar di Seattle, melanjutkan ke Minnesota, AS. Rombongan menginap semalam, Selasa.

Wapres dijadwalkan tiba di Washington, Rabu pagi waktu setempat. Ia akan menghadiri undangan Kongres AS serta berjabat tangan dengan Presiden AS Barack H Obama pada The National Prayer Breakfast Ke-57 di Hotel Hilton, Washington, dan bertemu Wapres AS Joe Biden.(Kompas)

2. Pembeli AS Langsung Beli ke Petani, Eksportir Kopi Merasa Dilangkahi

Eksportir kopi merasa dilangkahi. Sebab, pembeli asal Amerika Serikat (AS) memotong kompas jalur distribusi pembelian kopi dalam negeri. "Saat ini pembeli dari AS lebih senang membeli kopi langsung ke perusahaan perkebunan kopi," ujar Rachim Kartabrata, Sekretaris Eksekutif Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Senin (2/1) kemarin.

Padahal selama ini, distribusi kopi dari Indonesia ke AS melalui orang ketiga atau distributor yang merupakan Eksportir Terdaftar. Potong kompas importir asal AS inilah yang membuat eksportir gerah.

Eksportir pun meminta pemerintah mengatur mekanisme jual-beli kopi. Eksportir meminta pemerintah mendesak para pembeli asal AS mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Kopi.

Aturan itu mengharuskan ekspor kopi hanya melalui perusahaan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ET-Kopi). Peraturan itu berlaku untuk semua jenis kopi, termasuk kopi Arabica maupun Robusta.

Saat ini harga kopi di tingkat petani Rp 13.000 per kilogram (kg). Sedangkan kopi Robusta, harga di pasar dalam negeri sekarang Rp 20.000 per kg, dan harga kopi Arabika sekitar Rp 27.000 per kg.

Alih-alih memenuhi permintaan eksportir, Departemen Perdagangan malah beralih, seharusnya eksportir perlu ikut mendampingi pembeli asal AS saat membeli kopi ke petani.

Menurut Direktur Ekspor Hasil Pertanian dan Perkebunan Departemen Perdagangan Yamanah AC, pemerintah memang tidak melarang mekanisme pembelian kopi oleh pembeli dari luar negeri secara langsung ke petani. "Mungkin pembelian itu perlu didampingi eksportir terdaftar, kalau itu boleh," kata Yamanah. Lagi pula, pembelian langsung itu kan, menguntungkan petani. (Kontan)

3. **Dubes Diminta Ikut Jaga Ekspor**

Pemerintah meminta para duta besar (dubes) luar biasa berkuasa penuh yang baru dilantik untuk ikut mengupayakan membuka pasar ekspor produk Indonesia.

Caranya, menjaga hubungan baik dengan para negara bersahabat sehingga permintaan ekspor tidak menurun. "Seluruh dubes diminta untuk menjaga ekspor di negara tempat mereka bertugas," ujar Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Mahendra Siregar se usai pembekalan 15 Dubes Indonesia untuk negara sahabat di Jakarta kemarin.

Di samping itu, mengupayakan negosiasi dengan negara-negara yang melakukan proteksi terhadap wilayah lain. Kebijakan tersebut, kata Mahendra, akan menghambat permintaan ekspor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada periode Desember 2008 turun 9,57%, atau mencapai USD8,69 miliar dibandingkan bulan sebelumnya.

Nilai ekspor bahkan turun hingga 20,56% bila dibandingkan Desember 2007. Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ali Rosidi mengatakan, permintaan ekspor terus menyusut sejak Oktober 2008. Meski begitu, lanjutnya, penurunan ekspor Desember masih lebih rendah dibandingkan nilai impor sehingga neraca perdagangan Indonesia tetap positif.

BPS mencatat, penurunan ekspor Desember disebabkan terkoreksinya ekspor migas sebesar 13,69% dari USD1,44 miliar pada November menjadi USD1,24 miliar. Kondisi serupa tampak pada ekspor nonmigas yang mencatatkan penurunan sebesar 8,84% menjadi USD7,44 miliar dari USD8,17 miliar.

Namun secara kumulatif, yakni Januari–Desember 2008, nilai ekspor Indonesia naik 19,86% menjadi USD136,76 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari sektor nonmigas, penurunan ekspor terbesar selama Desember terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan/nabati sebesar USD382,6 juta.

Mahendra juga membekali seluruh Dubes tadi dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam merespons krisis keuangan global. Pembekalan ini diharapkan bisa dikomunikasikan kepada para negara sahabat.

Ke-15 dubes tersebut antara lain Ahmad Rusdi untuk Republik Yunani, Dian Triansyah Djani (PBB, WTO, dan organisasi internasional lain di Jenewa), Eddy Setiabudhi (Timor Leste), Eddy Pratomo (Republik Federasi Jerman), Harsha Edwana Joesoef (Republik Slovakia), Yudhistiranto Sungadi (Tanzania merangkap Rwanda, Burundi, dan Comoros).

Kemudian, I Gede Ngurah Swajaya (Kamboja), Ishak Latuconsina (Pakistan), Mohammad Oemar (Malta dan Siprus), Muhammad Ibnu Said (Tunisia), Nicholas Tandil Dammen (Republik Korea), Nining Suningsih Rochadiat (Ukraina merangkap Georgia, dan Armenia).

Primo Alui Joeliyanto (Australia merangkap Republik Vanuatu), Zainulbahar Noor (Yordania, Hasyimia merangkap untuk Republik Palestina), dan Zet Mirzal Zainuddin (Bangladesh merangkap Nepal). (Koran Sindo)

4. **KRISIS EKONOMI Asia Pulih, Jika Tingkatkan Permintaan**

Perekonomian di Asia dapat segera pulih dengan jalan meningkatkan permintaan di kawasan dan meninggalkan ekspor ke AS serta Eropa yang selama ini menjadi andalan dalam meraup devisa.

Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn mengatakan peningkatan permintaan tersebut dapat dimulai dari rumah tangga warga Asia.

"Dengan peningkatan itu, terutama untuk produk industri, maka Asia dapat segera pulih, karena ketergantungan terhadap ekspor dari AS dan Eropa dapat segera dihilangkan," kata Kahn seperti dikutip AP, kemarin.

Namun, lanjut dia, pengalihan permintaan itu tidak dapat dilakukan dalam waktu sekejap, perlu sosialisasi dan waktu. "Paling tidak harus terus dikampanyekan penggunaan produk Asia," tegasnya.

Logikanya, sambung dia, ditengah melesunya perekonomian AS dan Eropa, permintaan dari kedua wilayah itu juga akan menurun. "Tidak mungkin bagi Asia untuk mengalami pemulihan sementara bagian lain dunia berada dalam kondisi yang buruk," ucapnya.

IMF memperkirakan Asia bakal tumbuh 2,7 persen pada tahun ini, turun dari perkiraan November yang sebesar 4,9 persen. "Sangat tidak menentu. Hasil yang lebih buruk tidak dapat dikesampingkan. Ada beberapa risiko naik namun banyak risiko turun," kata Kahn.

Perekonomian Asia kemungkinan akan tumbuh pada tingkat rata-rata lebih dari lima persen pada tahun depan dengan pertumbuhan di beberapa negara akan terangkat dengan cepat begitu lingkungan meningkat, katanya.

China, lanjutnya, perekonomian terbesar kedua di Asia setelah Jepang, masih akan mencapai target pertumbuhan delapan persen dalam produk domestik bruto (PDB) tahun ini. "Tidak bisa dipungkiri China merupakan kepentingan yang besar dan luar biasa bagi perekonomian dunia," ucapnya.

Kahn melihat bahwa saat ini China tengah bersiap untuk mengambil beberapa kesempatan dengan memberikan berbagai stimulus bagi industrinya.

"Di China, saya melihat sejumlah kesempatan bahkan hingga stimulus fiskal tambahan sudah diberikan. Hal ini akan menjadi pemicu bagi industri di negara itu untuk terus tumbuh dan berkembang," paparnya.

Pada November, China mengumumkan rencana stimulus fiskal untuk membelanjakan empat triliun yuan atau 584 miliar dolar AS pada proyek infrastruktur dan lainnya. Strauss-Kahn mengulangi kembali bahwa mata uang China, yuan, dalam posisi "undervalue" namun bahwa fokus negara itu harus kepada pemulihan ekonomi untuk sementara ini.

Dalam perkiraan terbarunya, IMF memperkirakan perekonomian China akan tumbuh sebesar 6,7 persen pada tahun ini, yang melambat tajam dari 9,0 persen pada 2008.

Dalam penilaian suram terhadap perekonomian dunia, IMF pada pekan lalu menurunkan perkiraan 2009-nya bagi pertumbuhan global hingga 0,5 persen, angka terlemah sejak Perang Dunia II, dari perkiraan November sebesar 2,2 persen.

IMF juga mengatakan pada awal pekan ini perekonomian di Korsel akan mengalami penurunan yang sangat tajam dan mengalami kontraksi sebesar empat persen, namun negara ini akan mengalami pemulihan pada 2010 ketika dunia sudah pulih.

Perkiraan IMF terhadap Korsel ini menandai kinerja terburuk negeri ginseng yang telah mengalami kontraksi 6,9 persen pada 1998, sementara bank sentral negara itu memperkirakan kontraksi hanya akan terjadi sesar 4 persen.

Data yang disiarkan oleh Kementerian Keuangan Korea Selatan juga menunjukkan bahwa IMF memperkirakan pertumbuhan perekonomian Meksiko akan mengalami kontraksi sebesar 0,3 persen pada tahun ini, penurunan dari perkiraan sebelumnya yakni pertumbuhan 0,9 persen. (Suara Karya)

5. **Pengangguran Bisa Naik 9%**

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan angka pengangguran Indonesia tahun ini akan naik 8,5–9% akibat dampak krisis keuangan global.

Selain itu, pertumbuhan pendapatan kotor akan merosot menjadi 2% bila dibandingkan dengan 2007 yang naik sekitar 6%. Ekonom dan Program Manager ILO Jakarta Marcus Powell

mengatakan, penurunan pendapatan kotor di Indonesia lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia yang diproyeksikan turun 3%.

"Ini menunjukkan bahwa dampak krisis keuangan global di Indonesia lebih sedikit dibandingkan dunia," ujarnya dalam sebuah diskusi tentang respons buruh terhadap krisis ekonomi dunia di Jakarta kemarin. ILO mengindikasikan, beberapa daerah akan terkena dampak lebih dalam dari krisis dibandingkan wilayah lainnya.

Jawa Barat, misalnya, karena banyaknya pekerja di bidang industri yang berorientasi ekspor. Marcus mencatat, sejauh ini 15.000 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tersebut. Di lokasi yang sama, sektor tekstil juga telah memecat 14.000 karyawannya, dan dalam waktu dekat industri manufaktur dan kerajinan berencana memberhentikan 35.000 pegawai.

Pada periode November 2008, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat, jumlah pekerja korban PHK mencapai 2.000 orang. Jumlah ini melonjak tajam menjadi 26.000 pada Januari kemarin. Marcus mengungkapkan, akibat krisis keuangan global, banyak perusahaan tidak lagi merekrut pekerja dan mengurangi jam lembur.

Untuk menghindari PHK, kata dia, beberapa perusahaan juga mengubah sistem kepegawaiannya dengan memperbanyak pekerja kontrak. Di luar itu, lanjutnya, ada juga dampak terhadap pengangguran terselubung atau pegawai dengan jam kerja kurang dari 35 jam per minggu, hilangnya jaminan kerja karena ada pergeseran ke sektor informal, dan kemiskinan yang terus berjalan.

"Tingkat pengangguran hanya gunung esnya," kata dia. Kelompok lain yang akan terkena dampak adalah golongan anak muda yang masih menganggur. ILO memperkirakan jumlahnya akan naik karena menyusutnya pasar tenaga kerja. Mereka, sambung Marcus, kemungkinan hanya bisa masuk pada jenis pekerjaan paruh waktu.

Jumlah pekerja migran asal Indonesia juga diprediksi merosot lantaran Malaysia dan Korea Selatan menyedot masuknya tenaga kerja dari luar. Hal ini seiring pelambatan aktivitas ekonomi di kedua negara tersebut akibat krisis global.

Selain berdampak pada penerimaan devisa negara, berkurangnya permintaan tenaga kerja dari luar akan menekan daya beli masyarakat. Dampak lain yang juga berpotensi terjadi, ujar Marcus, adalah melonjaknya angkatan buruh anak. "Karena orangtua yang di-PHK akan membiarkan anaknya bekerja," kata dia.

Sebagai respons terhadap krisis keuangan global, pemerintah telah menganggarkan dana stimulus fiskal senilai Rp71,3 triliun dalam APBN 2009. Menurut Marcus, pemerintah perlu memikirkan kebijakan lain bagi pekerja, di antaranya meningkatkan lapangan pekerjaan di sektor pekerjaan umum, memberikan jaminan kerja di tingkat nasional, memperkuat sistem perlindungan sosial, terutama pada sektor informal, dan mempererat dialog tripartit.

"Untuk merumuskan solusi yang bisa diterima semua pihak," ujarnya. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto menyayangkan arah stimulus fiskal yang belum menyentuh sektor-sektor setelah produksi, seperti penguatan pasar domestik secara optimal. Upaya pemerintah sejauh ini baru membatasi jumlah pelabuhan terbuka dan barang-barang impor.

Menurut dia, perlu ada kewajiban menyubstitusi barang impor tertentu pada produk-produk dalam negeri. Kebijakan ini akan meningkatkan penjualan nasional sehingga kapasitas produksi di pabrik bisa digunakan optimal. "Kalau (penggunaan kapasitas) tidak turun, berarti tidak ada PHK," katanya.

Djimanto mengatakan, selama pasar domestik masih lemah, perhitungan angka pengangguran ILO tadi bisa menjadi kenyataan. "Kalau kita tidak berhasil mengatasi dampak (krisis) ini, pengangguran akan seperti itu," kata dia. (Koran Sindo)

C. SOSBUD

:

1. 100,000 Indonesian workers to be sent home

Around 100,000 Indonesian laborers in Malaysia are expected to return to Indonesia this year as Malaysia experiences an economic slowdown.

"Just before Chinese New Year, about 10,000 workers in Johor had already been sent back to Indonesia. We expect an increase in layoffs in the near future," Indonesian Ambassador to Malaysia Da'i Bachtiar said, as quoted by *tempointeraktif.com*.

However, Da'i added Malaysia's Human Resources minister, S. Subramaniam, had told the Indonesian Embassy that the government would try its best to reduce the numbers of workers being sent home.

He also said Malaysia was currently host to 2 million Indonesian workers, 800,000 of whom were working illegally.

"We've got more than 300,000 workers in the manufacturing sector, and a third of them will gradually be laid off," Da'i said.

Those working as domestic helpers, however, will be least affected by the economic downturn, the ambassador pointed out, "Unless their employers decide to send them home." (The Jakarta Post)

2. Musik Dangdut Dipelajari di 70 Negara

Musik dangdut semakin mendunia, hingga saat ini sudah dipelajari oleh pusat budaya di 70 negara, kata Rhoma Irama, penyanyi yang digelar Si Raja Dangdut.

"Sejak revolusi dangdut yang pertama dulu (1970-an), musik dangdut terus berkembang dan bahkan diminati masyarakat dunia," kata Rhoma Irama, saat menghadiri peluncuran album "Dangdut in America" yang menampilkan penyanyi muda asal Maryland, AS, Arreal Tilghman, di Jakarta, Selasa (3/2).

Rhoma mengungkapkan, musik dangdut di Amerika pertama kali dipelajari oleh Profesor Andrew Winebourg di University of Pittsburg. "Dari sini musik dangdut kemudian menyebar ke berbagai negara," jelasnya.

Menanggapi munculnya Arreal Tilghman sebagai warga AS pertama yang membuat album dangdut, Bang Haji, sapaan akrab Rhoma Irama, menyebutnya sebagai kejutan besar. Arreal Tilghman merupakan juara audisi "Dangdut in America" yang digelar selama dua tahun oleh produser Rissa Asnan. "Audisi ini sungguh tidak mudah, Arreal ini saya dapat lewat audisi terakhir tahun lalu, yang digelar di Delaware, Philadelphia," katanya.

Arreal, seorang warga AS keturunan Afrika, menyatakan, dirinya sebelum mengikuti audisi bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. "Saya tertarik mendengar dangdut, karena musik ini tidak ada di negara saya. Saya mempelajari lagu 'Dara Muda' ciptaan Rhoma Irama, dan saya menang. Lagu itu luar biasa, membuat orang asyik bergoyang," katanya.

Peluncuran album Arreal Tilghman merupakan yang kedua, setelah sebelumnya diluncurkan di Amerika pada November tahun lalu. Album itu berisi delapan lagu, antara lain "Puzzle of Love", Sejak Kehadiranmu, "I Love You", Duhai Kekasih, "You're The Only One", dan "You".

Menjawab wartawan, sang penyanyi mengatakan "Saya tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa datang. Tetapi peluncuran di Amerika kemarin mendapat sambutan luar biasa." Rhoma Irama, saat diminta berkomentar tentang cengkok suara Arreal, menyatakan, "Secara umum karakter suaranya memenuhi spesifikasi untuk penyanyi dangdut." (Media Indonesia)

3. Tur "Laskar Pelangi" di Enam Kota Australia

"Laskar Pelangi" pada bulan Maret akan hadir di enam kota Australia bersama Riri Reza (sutradara) dan Mira Lesmana (produser).

Nonton bareng dan diskusi tersebut diselenggarakan Pengurus pusat Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) pada 21-29 Maret 2009.

Kepada ANTARA yang menghubunginya dari Brisbane, Rabu, Ketua Umum PPIA Pusat, Mohamad Fahmi, mengatakan, kegiatan yang merupakan hasil kerja sama PPIA Pusat dengan cabang dan ranting PPIA di seluruh Australia itu akan digelar di kota Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, Canberra, dan Brisbane.

"Kita sudah dapat konfirmasi persetujuan dari pihak Laskar Pelangi. Tiga awaknya akan hadir dalam tur di enam kota itu, termasuk Riri Reza (sutradara-red.) dan Mira Lesmana (produser-red.)," katanya.

Mohamad Fahmi mengatakan, pihaknya memilih film produksi 2008 yang telah ditonton lebih dari satu juta orang, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu karena isi film yang diangkat dari novel pertama Andrea Hirata (2005) ini diharapkan dapat semakin memompa semangat belajar para pelajar Indonesia di Australia.

Tur Laskar Pelangi di enam kota itu juga merupakan bagian dari upaya pengurus pusat PPIA menjaga kemandirian organisasi dan menumbuhkan semangat kewirausahaan para anggotanya, katanya.

Film yang mengisahkan kehidupan sepuluh orang anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitong dan semangat dua orang guru mendidik murid-muridnya itu mulai diputar di bioskop-bioskop Tanah Air pada 25 September 2008.(ANTARA)

D. HANKAM :

1. KRI Diponegoro Siap Bertolak ke Libanon

KRI Diponegoro akan bertolak dari Surabaya menuju Libanon, Selasa (10/2) pekan depan. Kapal yang diawaki 99 prajurit TNI AL itu tergabung dalam satuan tugas maritim pasukan perdamaian PBB di Libanon.

"Persiapannya sudah matang. Kapal layak beroperasi mengemban misi PBB," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Laksma Iskandar Sitompul kepada *Jurnal Nasional*, Selasa (3/2). Iskandar mengatakan, dua hari lalu, Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno telah menerima paparan Komandan Satuan Maritim PBB Kolonel Aan Kurnia dan Komandan KRI Diponegoro-365 Letkol Arsyad Abdullah.

Dalam pertemuan tersebut, KSAL menekankan pencapaian misi perdamaian dilaksanakan penuh rasa tanggung jawab, serta tetap memerhatikan keselamatan diri dan material yang telah dipercayakan. "Tunjukkan profesionalitas prajurit TNI dan bawa nama harum bangsa Indonesia," katanya.

Iskandar menambahkan, permintaan PBB ini menjadi kehormatan bagi TNI AL. Dalam konteks pasukan, TNI sudah puluhan tahun mengirim personel. Namun, baru kali ini ada permintaan untuk menghadirkan armada laut RI dalam suatu misi perdamaian.

Selain Indonesia, beberapa negara telah mengirimkan kapal perangnya seperti Prancis, Turki, Yunani, Italia, Spanyol, dan Jerman. Tugas utama KRI Diponegoro adalah mencegah masuk dan keluarnya senjata dan material yang berhubungan dengan senjata.

Kapal juga akan membantu Angkatan Laut Libanon menegakkan kedaulatan negaranya. Rencananya, KRI Diponegoro akan melaksanakan tugas perdamaian selama enam bulan sampai September 2009.

"Akan digantikan dengan kapal kedua bila Indonesia dianggap berhasil dalam misi ini," kata Iskandar. Saat ini, tambahannya kesiapan kapal, helikopter N-BO 105, maupun awak terus digodok di Komando Armada Timur, Surabaya. Dengan kepercayaan yang besar ini, matra laut tidak main-main melakukan persiapan, termasuk kemampuan kapal yang dikirim.

KRI Diponegoro merupakan korvet Sigma pertama yang dipesan TNI AL dari Belanda. Persenjataan kapal ini memang terbilang mutakhir, antara lain meriam super rapid 76 mm, rudal antikapal Exocet MM-40, rudal antipesawat udara Mistral Simbad-Tetral, dan torpedo antikapal selam A-244S. Sistem radar MW 08 yang dimiliki juga sudah terintegrasi dengan sistem senjata. (*Jurnal Nasional*)

E. HUKUM :

1. KPK Kerja Sama dengan SPRM

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerja sama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)/Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) atau Komisi Antikorupsi Malaysia.

Wakil Ketua KPK M Jasin menjelaskan, kerja sama akan fokus pada pemberantasan korupsi di kedua negara bertetangga ini. Kedua lembaga akan saling membantu menangani dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan warga negara Indonesia dan Malaysia.

"Kerja sama ini sudah menghasilkan output yang efektif," kata Jasin di sela-sela pertemuan dengan pejabat SPRM di Gedung KPK Jakarta kemarin. Chief Commissioner MACC Hon Dato' Sri Haji Ahmad Said bin Hamdan mengatakan, salah satu pelajaran yang diambil dari Indonesia dalam pemberantasan korupsi adalah adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sejauh ini, Malaysia masih berencana membentuk pengadilan khusus yang menyidangkan kasus korupsi. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sendiri hingga saat ini masih dalam proses.

SPRM saat ini didukung 1500 personel dengan 15 cabang di berbagai daerah. Personel ini akan bertambah menjadi 5000 personel. Sementara KPK saat ini hanya memiliki sekitar 600 personel dengan jumlah penduduk dan wilayah yang lebih luas dari Malaysia. (Koran Sindo)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP : Tidak Ada

III. ARTIKEL :

1. Creeping maritime jurisdiction: Disclosing what lies beneath the oceans (by I Made Andi Arsana)

Almost 64 years ago, the American President, Harry S. Truman, proclaimed that the natural resources of the subsoil and seabed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control.

He asserted that the United States preserves the rights to explore and exploit natural resource therein.

This monumental movement was then followed by other states in the world, which then became the inseparable part of the history of creeping maritime jurisdiction.

Since then, it has been viewed that a state should be able to exercise its sovereignty or sovereign rights not only over its land territory but also over its maritime area adjacent to the land.

Similarly, Indonesia claimed that maritime area within the area of the Indonesian archipelago is part of Republic of Indonesia.

The declaration is dated Dec. 13, 1957, and popularly known then as the Djuanda Declaration, named after the Indonesian Prime Minister who made the declaration.

This is the seed of the archipelagic state concept and also Wawasan Nusantara (archipelagic outlook).

In the twenty-first century, efforts to secure more maritime area or at least to confirm sovereign rights over larger maritime area remain no different.

The United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS) gives an opportunity for coastal States to confirm their sovereign rights over continental shelf (seabed) beyond 200 nautical miles from its baseline (coastline).

This is often referred to as outer or extended continental shelf (ECS). To do this, coastal states should define the limits of their continental shelf and make submissions to the United Nations Commissions on the Limits of the Continental Shelf (the Commission).

Russia was the first state to submit its proposal to the Commission followed by other states.

Indonesia also took its part to confirm its ECS by making a partial submission for the area to the north west of Sumatra on June 16, 2008.

As per today, 16 submissions have been received by the Commission. Approaching the deadline for the majority of the States Party to UNCLOS, on May 13, 2009, more submissions are expected to arrive in the desk of the Commission at the United Nations Headquarters in New York City, the United States.

One common reason for the submission is to secure rights to explore and exploit natural resources of the seabed beyond 200 nautical miles from baseline.

Australia is one of the states whose submission/proposal has been recommended by the Commission. Not less than 2.5 million square kilometers of ECS have now been confirmed under the new Australian sovereign rights out of its 3.4 million square kilometer proposal.

Now, the maritime area of Australia is significantly larger than it was before. Considering its enormous size of maritime area, Australia can be seen as a maritime nation.

Defining the outer limits of maritime jurisdiction and securing a larger maritime area is of course not the end of the story.

Serious efforts are then required to investigate what lies beneath the ocean.

Hopes and potentials of the ocean will remain a mystery until they are disclosed and revealed.

This is the reason for the research survey conducted by Australia in its jurisdiction in the Indian Ocean.

Through the "University of the Sea" program, I was lucky enough to be involved in a survey to map the ocean floor of the Wallaby Plateau to the west of Western Australia.

This research was undertaken to investigate the potential of living and non living resources of the seabed, and subsea areas.

Not only to identify the resources, the aim is also to properly manage the marine environment.

This is a sophisticated marine scientific research using a German research vessel, which involves considerable expense.

This opinion, is however not an official report of the research, which will be released in the near future.

Having closely observed the research survey for nearly a month, I can tell that to disclose what lies beneath the ocean is an important part of managing the maritime jurisdiction for the benefit of the nation.

It involves the use of sophisticated technology (hydrographic mapping, seismic survey, gravimetry survey etc.) with a well-planned survey design.

It is a challenging process that requires good team work and a large financial investment to be successful.

Regardless of its challenges, this is one of the only ways to know the ocean better.

It seems that the government of Australia through its technical institution, Geoscience Australia, has made an important decision to conduct the survey.

What Australia has been demonstrating can be a comparative study for Indonesia being the largest archipelagic state in the world. The declaration made by PM Djuanda 51 years ago should not be the end of the story. The most important challenge to face is how to discover the potentials of the ocean for the prosperity of people.

This requires not only a large amount of budget but the very first thing is commitment and understanding of the importance of the ocean resource to be managed. To sum up, securing a large maritime area is not end of the story. That large maritime area has great potential analogous to a sleeping giant.

To do this, dedicated, well-panned, visionary researches and surveys are required. The attention to ocean affairs should be one of the important focuses of academia, government and also industry. (The Jakarta Post)

IV. LAIN-LAIN : Tidak Ada

V. EDITORIAL :

1. Menemukan Kembali Irak

Banyak yang berharap pemilu tingkat provinsi yang dilaksanakan di Irak, Sabtu lalu, akan menjadi titik awal kebangkitan negeri itu.

Pemilu Sabtu lalu boleh dikatakan sebagai sebuah catatan bersejarah bagi rakyat Irak. Inilah pemilu pertama Irak yang kembali memperoleh secara penuh kedaulatannya. Pemilu itu menjadi pengalaman pertama bagi kaum minoritas Sunni memainkan peran penting dalam menentukan masa depan negerinya.

Ini kali yang pertama rakyat Irak dapat memilih begitu banyak calon individual—14.467 orang yang memperebutkan 440 kursi—baik sebagai direktur atau gubernur dewan provinsi maupun anggota parlemen.

Saat Irak menggelar pemilu pertama tahun 2005, pascainvasi militer pasukan multinasional pimpinan AS, situasi dan kondisi, baik keamanan maupun kemasyarakatan Irak, berbeda dengan saat ini. Waktu itu pemilu dilaksanakan penuh ketegangan karena belum kondusifnya situasi keamanan. Irak juga masih ada di bawah kendali keamanan AS. Pemilu juga diboikot kelompok Sunni karena alasan keamanan. Namun, itulah uji coba pertama demokrasi Irak.

Pemilu hari Sabtu lalu adalah pemilu kedua, pascainvasi. Kalau pemilu pertama dianggap sebagai uji coba terhadap demokrasi, pemilu lalu sebagai pelaksanaan nyata dari demokrasi. Inilah langkah pertama untuk membangun negara demokrasi. Kelompok Sunni, yang tahun 2005 memboikot, kini penuh semangat menggunakan haknya meskipun secara keseluruhan diperkirakan turnout hanya 40 persen, lebih rendah daripada yang diharapkan, 51 persen.

Ikut sertanya kelompok Sunni—yang diperkirakan akan menguasai wilayah tengah dan merebut lagi suara di wilayah utara yang tahun 2005 direbut Kurdi—akan lebih menyeimbangkan komposisi penguasa daerah dan parlemen daerah, yang nanti pada gilirannya akan memberikan sumbangan pada parlemen nasional dan pemerintahan baru yang saat ini dikuasai kelompok Syiah.

Hasil sementara, yakni partai-partai agama kurang dilirik, memberikan gambaran bahwa Irak kembali ke jatidirinya. Sejak dulu, Irak adalah negeri yang orientasi ideologinya tidak berdasarkan pada agama.

Realitas di lapangan memberikan gambaran nyata, agama tidak menjadi faktor penggerak persatuan bangsa, tetapi justru pemecah, pengelompokan: selatan Syiah, tengah Sunni. Padahal, saat ini yang dibutuhkan adalah pemulihan kondisi ekonomi, stabilitas, keamanan, dan persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah sebabnya, partai-partai agama kurang laku. Apa pun hasilnya, kita berharap pemilu kali ini akan menjadi landasan kebangkitan rakyat Irak. (Kompas)

Jakarta, 4 Pebruari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu